



**ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE THE QUALITY OF INFORMATION OF REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS, POHUWATO REGENCY**

**ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO.**

**Ilyas Lamuda dan Ng Syamsiah.B**

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Gorontalo

email: [illyaslamuda@gmail.com](mailto:illyaslamuda@gmail.com)

#### **Abstract**

The purpose of this study To analyze the competence of Human Resources effect the quality of information financial statements. To analyze the Regional Financial Supervision affect the quality of information financial statements. To analyze the System Internal control affects the quality of financial statements. This research takes place at the Government Pohuwato District. Data collection method was done by distributing questionnaires. Data obtained in though by using descriptive statistic ie percentage and frequency, then processed data quality test analysis techniques and hypothesis test using Software Statistical Product and Service version 20. The result of the test shows that together the independent variable of human resource competence, the supervision of regional finance and the internal control system have an effect on the quality of the financial report information of the local government of Pohuwato Regency.

**Keywords :** Quality of Financial Statement Information, Human Resource Competence, Regional Financial Control, Internal Control System.

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan; Untuk menganalisis kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan. Untuk menganalisis Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. dan Untuk menganalisis Sistem Pengendalian Intern mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Obyek penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Metode pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan statistic deskriptif yakni persentase dan frekuensi, kemudian diolah teknik analisis uji kualitas data dan uji hipotesis menggunakan Software Statistical Product and Service versi 20. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas kompetensi sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato.

**Kata Kunci :** Kualitas Informasi Laporan Keuangan; Kompetensi Sumber Daya Manusia; Pengawasan Keuangan Daerah; Sistem Pengendalian Intern

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam

konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap tuntutan publik atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam (Peraturan pemerintah RI Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010). Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni:

a. Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat, sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Atau dengan kata lain, informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial.

b. Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila:

1. Dapat diuji kebenarannya (*verifiabel*)
2. Netral
3. Penyajian secara wajar/ jujur (*representational faithfulness*)

c. Dapat dibandingkan

Suatu informasi dikatakan memiliki manfaat apabila informasi tersebut dapat diperbandingkan, baik antar periode maupun antar entitas.

d. Dapat dipahami

Suatu informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan pengguna.

Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangannya seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan,

kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan. Fakta dan fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia sebelum reformasi belum menggembirakan. Saat itu, akuntansi pemerintahan di Indonesia belum berperan sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pada periode tersebut, *output* yang dihasilkan oleh akuntansi pemerintahan di Indonesia sering tidak akurat, terlambat, dan tidak informatif, sehingga tidak dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Hal lain kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. Atas kelemahan pengendalian intern tersebut, BPK menyarankan agar Pemerintah Daerah melakukan review atas sistem pembukuan dan penyusunan laporan keuangannya. Untuk itu diperlukan suatu sistem pengendalian internal yang memadai. Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Jika penerapan SPI berjalan dengan baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik, begitu juga sebaliknya jika penerapan SPI tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberi kontribusi optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Fenomena lain ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi. Disamping itu, kualitas sumber daya manusia yang minim mungkin memiliki pengaruh terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh kompetensi sumber daya manusia dalam lingkup SKPD bukan hanya ditujukan kepada para stakeholder dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk menyajikan informasi keuangan yang andal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah. Pengawasan pengelolaan keuangan menurut (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 2001). Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi. Pengawasan keuangan daerah terkait dengan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pada semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Pohuwato. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti analisis faktor-faktor mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: Untuk menganalisis kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Untuk menganalisis Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Untuk menganalisis Sistem Pengendalian Intern (SPI) mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian langsung. (Sugiyono, 2012) berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Prinsip penelitian kualitatif bersifat naturalistik atau alamiah. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat "natural" atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test. Penelitian ini tidak menguji suatu hipotesis, akan tetapi hanya ingin mengetahui keadaan variabel secara lepas, tidak menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya secara sistematis, oleh karena itu metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. McMillan & Schumacher dalam Soejono (2012:32) berpendapat pendekatan kualitatif adalah pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data

berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell, 2009). Penelitian ini mengambil lokasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah yang terdiri dari dinas-dinas, Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato dengan waktu penelitian yang akan penulis lakukan ini ditahun 2018. Jenis data yang digunakan data primer merupakan data-data yang diperoleh dengan cara langsung dari sumbernya. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara dan observasi langsung di tempat penelitian. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari buku-buku yang ada di tempat penelitian maupun literatur yang mendukung data-data penelitian. Data-data ini diperoleh dari dokumentasi maupun buku-buku literatur lainnya. Metode pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner agar diperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, obyektif dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis. Prosedur pengumpulan data melalui metode kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Pengawasan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sehingga dapat dianalisis pengaruhnya terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang berjumlah total 29 SKPD. Pengambilan sampel terhadap responden dilakukan secara *purposive*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria atau pertimbangan yang telah ditetapkan peneliti.

**Metode Analisis Data**

**F.1. Uji Kualitas Data**

**1. Uji Validitas**

Sebuah instrument penelitian dikatakan valid, jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Dalam analisis ini (Sugiyono, 2012), memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi yang menyatakan bahwa item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium skor total serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item-item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat jika  $r = 0,15$  dengan demikian apabila korelasi antar butir dengan skor kurang dari 0,15 maka pernyataan dari instrument tersebut dinyatakan tidak valid. Sedangkan hasilnya dibandingkan dengan nilai kritis pada tingkat signifikan 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Jika koefisien korelasi lebih besar dari nilai kritis maka alat ukur tersebut dikatakan valid sedangkan untuk mengukur kevalidan akan digunakan rumus korelasi produk moment sebagai berikut :

$$r = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana :

$r$  = Koefisien korelasi variabel bebas dan terikat

$n$  = Banyaknya nilai sampel

$X$  = Skor tiap item (variabel bebas)

Y = Skor tiap variabel (variabel terikat)

Nilai  $r_{xy}$  yang diperoleh dikaitkan dengan tabel nilai  $r$ , bila  $r_{xy} < \text{nilai } r_{\text{tabel}}$ , maka butir kuesioner dinyatakan gugur. Bila  $r_{xy} > \text{nilai } r_{\text{tabel}}$ , maka butir kuesioner dinyatakan valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat sejauh mana suatu instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Di dalam pengujian reliabilitas penulis menggunakan metode koefisien *alpha cronbach* dengan rumus sebagai berikut: (Sugiyono, 2004).

$$r_i = \frac{k}{(k - 1)} \left\{ 1 - \frac{\sum Si^2}{st^2} \right\}$$

Dimana :

- $r_i$  = Realibitas instrument
- $k$  = Mean Kuadrat antar Subyek
- $\sum st^2$  = Mean kuadrat kesalahan
- $st^2$  = Varians total

Kemudian dilakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperoleh dari kuesioner dengan cara memberikan bobot penilaian dari setiap pertanyaan lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja aparat berdasarkan skala likert.

Untuk pengolahan data yang digunakan alat bantu statistik dimana dengan alat tersebut dapat memudahkan penafsiran untuk menganalisa apakah ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y serta seberapa besar pengaruhnya yang akhirnya akan diperoleh suatu pedoman untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden, untuk memudahkan penilaian dari rata-rata tersebut, maka dibuat interval. Dalam penelitian ini penulis menentukan banyak kelas interval sebesar 5.

## F.2. Uji Asumsi Dasar

### Uji Normalitas

Untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas Informasi laporan keuangan maka kami menggunakan analisis regresi jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2013). Pengujian dengan menggunakan uji *statistic One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*(K-S). Jika nilai probabilitas signifikansi K-S lebih besar dari 0.05, maka data berdistribusi normal (Ghozali, 2013).

## F.3. Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2013). Multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance  $< 0,10$  atau samadengan nilai  $VIF > 10$  (Ghozali, 2013).

### 2. Uji Hipotesis

Model pengujian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression*). Model regresi berganda bertujuan untuk melakukan prediksi terhadap hubungan antara variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana:

Y = Variabel dependent (kualitas Informasi laporan keuangan)

a = Koefisien regresi (konstanta)

b1 = Koefisien regresi (kompetensi SDM)

X1 = Variabel independent (kompetensi SDM)

b2 = Koefisien regresi (pengawasan keuangan daerah)

X2 = Variabel independent (pengawasan keuangan daerah)

b3 = Koefisien regresi (SPI)

X3 = Variabel independent (SPI)

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila koefisien determinasi = 0, berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh sama sekali (= 0%) terhadap variabel tidak bebas. Sebaliknya, jika koefisien determinasi = 1, berarti variabel terikat 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. Karena itu letak berada dalam selang (interval) antara 0 dan 1, secara aljabar dinyatakan 0 1. Besarnya koefisien determinasi secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui dari skor atau kuadrat *partial correlation* dari tabel *coefficient*. Koefisien determinasi secara simultan diperoleh dari besarnya atau *adjusted R square*. Nilai *adjusted R square* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat amat terbatas. “Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat” (Ghozali, 2009 : 83). Defenisi Operasional Faktor-faktor yang diteliti adalah kompetensi sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern.

#### Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah Kualitas Informasi laporan Keuangan. Huang, *et al.* (1999) dalam Xu, *et al.* (2003) mendefinisikan kualitas informasi adalah sesuai untuk dengan kebutuhan pengguna informasi. Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah adalah memenuhi prasyarat normatif agar dapat mencapai tujuannya yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Kualitas informasi laporan keuangan daerah diukur dengan delapan indikator, yaitu: (1) manfaat dari laporan keuangan yang dihasilkan, (2) ketepatan pelaporan laporan keuangan, (3) kelengkapan informasi yang disajikan, (4) Penyajian secara jujur, (5) Isi laporan keuangan dapat diverifikasi, (6) Keakuratan informasi yang disajikan, (7) Isi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya (8) kejelasan penyajian informasi dalam laporan keuangan

#### Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat secara positif atau negatif (Sekaran, 2003). Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah kompetensi sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern (SPI).

#### Kompetensi Sumber daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai manusia yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Kompetensi menurut Guy *et al.* (2002) adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Xu, *et al.* (2003) mengatakan bahwa interaksi antara sumber daya manusia dan sistem adalah isu penting dalam implementasi sistem yang akan mempengaruhi kualitas informasi akuntansi. Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan instrumen yang dibuat oleh Xu, *et al.* (2003) Terdapat empat indikator, yaitu: (1) Pemahaman terhadap peraturan dan standar, (2) Interaksi dengan sistem, (3) Kontrol terhadap SDM, (4) Pendidikan dan training.

#### Pengawasan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010, pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

#### Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan atau *fraud* (Afriyanti, 2011) Variabel sistem pengendalian intern ini dapat diukur dengan instrumen yang dibuat oleh Xu, *et al.* (2003) dan dikembangkan oleh Choirunisah (2008). Terdapat tujuh indikator, yaitu: (1) Integritas data, (2) Ketepatan input dan posting data, (3) Prosedur otorisasi dokumen transaksi, (4) Tersimpannya dokumen sumber data, (5) Pembagian tanggungjawab, (6) Penentuan kebijakan dan standar akuntansi, (7) Implementasi kebijakan dan standar.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian**

Dalam hasil penelitian akan dijelaskan mengenai deskripsi data, statistik deskriptif, hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi dasar dan hasil uji asumsi klasik, serta hasil uji hipotesis.

#### **Deskripsi Data**

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pengelola keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pohuwato. Sesuai dengan metode penarikan sampel yaitu *Purposive Sampling* maka sampel penelitian

Distribusi mengenai penyebaran kuisisioner disajikan dari 29 SKPD, 4 diantaranya tidak bersedia menjadi lokasi penelitian. Kuisisioner yang disebar berjumlah 100 kuisisioner, 4 kuisisioner untuk masing-masing SKPD berdasarkan kriteria jumlah responden.

#### **Statistik Deskriptif**

Hasil statistik deskriptif berdasarkan data yang diperoleh dari responden berikut:

Menunjukkan dari 70 responden pada variabel kompetensi sumber daya manusia dihasilkan rentang aktual 25-38, artinya kompetensi sumber daya manusia yang rendah berada pada kisaran 25 dan yang lebih tinggi berada pada kisaran 38 sedangkan rentang

yang mungkin terjadi adalah antara 8 (menunjukkan kompetensi sumber daya manusia yang paling rendah) sampai 40 (menunjukkan kompetensi sumber daya manusia yang paling tinggi). Sedangkan untuk mean teoritis adalah 24 dan mean aktual sebesar 31.34. Variabel pengawasan keuangan daerah dihasilkan rentang aktual 20-35, artinya pengawasan keuangan daerah yang kurang berada pada kisaran 20 dan yang lebih tinggi berada pada kisaran 35. Sedangkan rentang yang mungkin terjadi adalah antara 7 (menunjukkan pengawasan keuangan daerah yang paling rendah) sampai 35 (menunjukkan pengawasan keuangan daerah yang paling tinggi). Sedangkan untuk mean teoritis adalah 21 dan mean aktual sebesar 27.23. Variabel sistim pengendalian intern dihasilkan rentang aktual 20-42 artinya sistim pengendalian intern yang kurang berada pada kisaran 20 dan yang lebih tinggi berada pada kisaran 42. Sedangkan rentang yang mungkin terjadi adalah 9 (menunjukkan sistim pengendalian intern yang paling rendah) sampai 45 (menunjukkan sistim pengendalian intern yang paling tinggi). Sedangkan untuk mean teoritis adalah 27 dan mean aktual sebesar 34.23. Untuk variabel kualitas informasi laporan keuangan dihasilkan rentang aktual 25-43 artinya kualitas informasi laporan keuangan yang kurang berada pada kisaran 25 dan yang lebih tinggi berada pada kisaran 43. Sedangkan rentang yang mungkin terjadi adalah 9 (menunjukkan kualitas informasi laporan keuangan yang paling rendah) sampai 45 (menunjukkan kualitas informasi laporan keuangan yang paling tinggi). Sedangkan untuk mean teoritis adalah 27 dan mean aktual sebesar 35.53.

Hasil statistik deskriptif berdasarkan rata-rata distribusi jawaban responden untuk setiap instrumen pertanyaan.

Menurut Variabel kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan instrumen dengan 9 pertanyaan, dari 4 indikator yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Berdasarkan pada tabel 4.5 diatas, untuk pertanyaan kategori relevan adalah 3 pertanyaan pertama. Rata-rata responden menjawab laporan keuangan yang dihasilkan ragu-ragu memberikan informasi untuk mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu, setuju menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu dan setuju menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Hal ini dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan sudah memenuhi kategori relevan. Pertanyaan nomor 4-7 untuk mengukur kategori andal, rata-rata responden menjawab sering menyajikan transaksi tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan, kadang-kadang informasi yang disajikan bebas dari kesalahan material, kadang-kadang menyajikan informasi yang diarahkan untuk kebutuhan umum, dan sering menghasilkan informasi keuangan yang dapat diuji. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi kategori andal. Rata-rata responden menjawab ragu-ragu untuk kategori dapat dibandingkan, dengan nilai mean 3,90. Hal ini berarti laporan keuangan yang disajikan belum sepenuhnya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Rata-rata responden menjawab sering untuk kategori dapat dipahami dengan nilai mean 4,10. Artinya, informasi keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh penggunanya. Berdasarkan nilai dari tabel 3.6 terlihat bahwa rata-rata responden menjawab pada skala 4 dengan persentase frekuensi 60,32% dan 18,89% untuk jawaban skala 5. Hal ini berarti penilaian terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sudah tinggi. Variabel kompetensi sumber daya manusia dengan 8 instrumen pertanyaan dengan rata-rata responden menjawab setuju untuk pertanyaan 1-3. Hal ini berarti, mereka setuju untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan berdasarkan pedoman mengenai proses akuntansi yang ada. Rata-rata responden menjawab netral untuk pertanyaan 4-6. Artinya, responden menilai bahwa materi pelatihan yang diberikan telah cukup dipahami serta cukup sesuai dengan kebutuhan sebagai

pengelola keuangan. Rata-rata responden menjawab netral untuk pertanyaan kategori pengalaman. Artinya, responden menganggap bahwa pengalaman mereka telah cukup untuk memenuhi Kompetensi sebagai pengelola keuangan. Secara keseluruhan, pengelola keuangan memiliki tanggungjawab yang tinggi dengan cukup pelatihan dan pengalaman. Berdasarkan tabel frekuensi jawaban responden diatas, terlihat bahwa rata-rata responden menjawab pertanyaan variabel X1 pada skala 4 dengan persentase 58,93%. Hal ini dapat dikatakan bahwa penilaian responden terhadap Kompetensi sumber daya manusia sudah baik. Variabel pengawasan laporan keuangan daerah diukur menggunakan 7 instrumen pertanyaan. Pertanyaan nomor 1-7 untuk mengukur media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berdasarkan tabel 4.5 diatas, terlihat bahwa rata-rata responden menjawab setuju dengan nilai mean 4,31. Setuju pelaksanaan realisasi APBD yang sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah., terlihat dari nilai mean 4,09. Nilai mean 4,14 menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju untuk menyajikan laporan keuangan yang dikoordinasi dan dibina pengelolanya oleh Menteri Dalam Negeri. Variabel sistem pengendalian intern diukur dengan 9 instrumen pertanyaan dengan 5 indikator. Jawaban responden untuk pertanyaan kategori lingkungan pengendalian dengan mean 3,69 dan 3,71 menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab netral untuk pertanyaan nomor 1 dan 2. Artinya, di instansi responden bekerja kadang-kadang diterapkan kode etik secara tertulis dan ragu-ragu pimpinan memberikan contoh dalam berperilaku mengikuti kode etik. Nilai rata-rata pertanyaan nomor 3 dan 4 sebesar 3,89 dan 3,80 merupakan jawaban rata-rata responden terhadap pertanyaan penilaian resiko. Artinya, diinstansi mereka bekerja kadang-kadang diterapkan batas penentuan toleransi dan pengendalian intern manajemen terhadap resiko. Kategori kegiatan penilaian dengan nilai mean 3,89 dan 3,86, artinya kadang-kadang transaksi dan aktivitas diinstansi mereka didukung dengan otorisasi dari pihak berwenang, serta adanya pemisahan tugas yang memadai. Nilai mean sebesar 3,80 dan 3,97 untuk kategori informasi dan komunikasi, artinya kadang-kadang diterapkan sistem informasi serta melaksanakan sistem akuntansi yang memungkinkan audit. Rata-rata responden menjawab Netral untuk kategori pemantauan, ditunjukkan dengan nilai mean 3,63. Artinya, kadang-kadang pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi. Secara keseluruhan sistem pengendalian intern pemerintah telah cukup diterapkan.

#### **Hasil Uji Kualitas Data**

##### **Hasil Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner yang digunakan. Teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas adalah koefisien korelasi *Pearson Correlation*. Data dikatakan valid jika total setiap konstruksinya signifikan pada level 0,05 atau 0,01. Hasil pengujian validitas dalam penelitian ini:

Dapat dijelaskan, hasil uji validitas diatas menunjukkan *Pearson Correlation* untuk setiap variabel yaitu, Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Pengawasan Keuangan Daerah (X2), dan Sistem Pengendalian Intern (X3) signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 atau 0,01. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengukur variabel yang diharapkan.

##### **Hasil Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas diukur dengan uji statistik *Cronbach's Alpha* ( $\alpha$ ). Jika nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,70$  maka data dikatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dapat terlihat berikut :

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas pada tabel diatas, hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* ( $\alpha$ ) untuk setiap variabel adalah lebih besar dari  $0,70$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan untuk masing-masing variabel dikatakan reliabel.

#### **Hasil Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal. Uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-smirnov* dengan nilai  $\rho$ -*kolmogorov-smirnov test*  $> 0,05$  (Ghozali, 2011). Hasil pengujian normalitas dapat dilihat berikut :

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel diatas, terlihat bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *kolmogorov-smirnov* lebih besar dari  $0,05$ , sehingga variabel penelitian ini berdistribusi normal.

#### **Hasil Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji ini dapat dilihat dari nilai VIF  $< 10$  dan toleransi  $> 0,10$  maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2011). Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat berikut :

Berdasarkan pengolahan data, dapat dilihat hasil perhitungan nilai Tolerance dan VIF. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki nilai tolerance  $> 0,10$ , dan nilai VIF  $< 10$ , sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

#### **Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terjadi kesamaan varian dalam model dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas digunakan dengan metode *Glejser*. Model regresi dikatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila probabilitas signifikansi variabel independen diatas  $0,05$ .

Model hasil Heteroskedastisitas dapat dijelaskan bahwa semua variabel X1, X2, X3, berada diatas  $0,05$ . artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### **Hasil Uji Hipotesis**

Untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu, kompetensi sumber daya manusia (X1), Pengawasan Keuangan Daerah (X2), dan sistem pengendalian intern (X3) terhadap variabel dependen yaitu, kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Y) digunakan model regresi berganda, Hasil olah data dengan bantuan SPSS 20 dapat terlihat hasil persamaanya adalah  **$Y = 10.406 + 0.268 + 0.268 + 0.276$** .

Dapat dilihat bahwa F hitung sebesar  $13,346$  dengan angka signifikansi =  $0,000$ . Karena nilai signifikansi dari data analisis lebih kecil dari  $0,05$  maka dapat diartikan bahwa model penelitian ini adalah layak atau dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap kualitas informasi laporan keuangan berdasarkan pada tabel 4.12 diatas adalah variabel sistem pengendalian intern (X3) yaitu sebesar  $0.276\%$ . Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*adjusted R square*) sebesar  $0,349$ , yang berarti bahwa  $34,9\%$  variabel besarnya kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah dan sistem

pengendalian intern. Sedangkan sisanya sebesar 65,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

Dari hasil analisis diatas, terlihat bahwa nilai koefisien dari variabel independen kompetensi sumber daya manusia (X1) bernilai positif yaitu 0,268 dengan nilai signifikan bernilai 0,047 ( $< 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama yang menyatakan “kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah” **diterima**. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Nilai koefisien variabel pengawasan keuangan daerah (X2) bernilai positif sebesar 0,268 dengan nilai signifikan 0,039 atau nilai signifikan  $< 0,05$ . Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama yang menyatakan “pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah” **diterima**. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Hasil yang sama juga terlihat dari nilai koefisien variabel independen sistem pengendalian intern (X3) bernilai positif sebesar 0,276 dengan nilai signifikan 0,031 atau nilai signifikan  $< 0,05$ . Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama yang menyatakan “sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah” **diterima**. Dari hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.

### **Pembahasan**

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektivitas serta efisiensi kinerja sehingga menghasilkan output dan hasil (Zuliarti, 2012). Apabila kemampuan yang dimiliki oleh pegawai pengelola keuangan baik, maka output atau hasil berupa laporan keuangan akan semakin baik.

Kompetensi sumber daya manusia diukur dengan indikator pendidikan, tanggungjawab, pelatihan dan pengalaman. Berdasarkan data dari jawaban responden rata-rata pendidikan pegawai pengelola keuangan adalah lulusan S1, maka sudah dianggap cukup memadai untuk menjalankan tugas sebagai pengelola keuangan dengan bekal ilmu dan keahlian yang dimiliki. Responden memberikan jawaban setuju untuk indikator tanggungjawab dan rata-rata memilih jawaban ragu-ragu untuk indikator pelatihan dan pengalaman dengan persentase 21,43%. Hal ini berarti jika pegawai memiliki tanggungjawab dan menjalankan tugasnya berdasarkan pedoman maka Kompetensinya semakin baik dan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa nilai koefisien dari variabel kompetensi sumber daya manusia (X1) bernilai positif yaitu 0,268 dengan nilai signifikan bernilai 0,047 ( $< 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Febrian Cahyo Pradono Basukianto, 2015) yang menyatakan

bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Kemudian, (Ayu, Kiranayanti, Made, & Erawati, 2016) yang menyatakan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Delanno & Deviani (2013) **Ida Ayu Enny Kiranayanti** 1

**Ni Made Adi Erawati**, yang menyatakan bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk menyajikan informasi keuangan yang andal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Di dalam prosedur pengawasan, mencakup pula mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan adanya pengawasan yang baik, maka laporan keuangan pemerintah daerah dapat disampaikan dengan tepat waktu. Berdasarkan data jawaban responden, rata-rata responden menjawab setuju tentang proses pengawasan keuangan daerah yang merupakan pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan, dengan persentase frekuensi sebesar 22,25%. Hal ini berarti terdapat hubungan antara pengawasan keuangan daerah dengan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato. Semakin baik pengawasan keuangan daerah, maka semakin baik pula kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa nilai koefisien variabel pengawasan keuangan daerah (X<sub>2</sub>) bernilai positif sebesar 0,268 dengan nilai signifikan 0,039 atau nilai signifikan < 0,05. Hal ini berarti bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Galuh Fajar & Deviani (2013) dengan hasil, Pengawasan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Daerah. Kemudian, (SYARIF SYAHRIR MALLE, 2013), bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dimaksudkan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008). Dengan begitu, maka

penyelenggaraan keuangan atas kegiatan pemerintahan dapat mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien. Indikator untuk mengukur variabel ini didasarkan pada PP No. 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Berdasarkan data jawaban responden, rata-rata responden menjawab ragu-ragu untuk setiap indikator penilaian, yang artinya dari kelima unsur pengendalian tersebut masih belum dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato. Semakin baik penerapan SPI maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa nilai koefisien variabel sistem pengendalian intern (X3) bernilai positif sebesar 0,276 dengan nilai signifikan 0,031 atau nilai signifikan  $<0,05$ . Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (sukmaningrum Tantriani, 2015) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian, Sagung Inten Evicahyani dan Nyoman Djinar Setiawina (2014) dengan hasil penelitiannya bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Raja Yoga Gustika Armel (2017), pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai koefisien dari variabel kompetensi sumber daya manusia (X1) bernilai positif yaitu 0,268 dengan nilai signifikan bernilai 0,047 ( $< 0,05$ ). Hal ini disebabkan pembinaan yang dilakukan berupa pelatihan terhadap staf bagian keuangan SKPD Pemerintah Daerah dan selalu dilibatkan dalam pengarahan untuk penyusunan laporan keuangan serta tanggungjawab dan pengalaman yang mereka miliki.
2. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai koefisien variabel pengawasan keuangan daerah (X2) bernilai positif sebesar 0,268 dengan nilai signifikan 0,039 atau nilai signifikan  $< 0,05$ . Hasil ini memberi indikasi bahwa kegiatan pengawasan keuangan telah dilakukan pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Artinya pengawasan keuangan yang semakin baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga tujuan untuk membuat informasi laporan keuangan yang berkualitas dapat tercapai.
3. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai koefisien variabel sistem pengendalian intern (X3) bernilai positif sebesar 0,276 dengan nilai signifikan 0,031 atau nilai signifikan  $<0,05$ . Hasil ini memberi indikasi bahwa kegiatan pengawasan intern telah dilakukan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Artinya pengawasan intern yang semakin baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga tujuan untuk membuat informasi laporan keuangan yang berkualitas dapat tercapai.

4. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari hasil analisis, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*adjusted R square*) sebesar 0,349, yang berarti bahwa 34,9% variabel besarnya kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern. Sedangkan sisanya sebesar 65,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

## **1. DAFTAR PUSTAKA**

- Ayu, I., Kiranayanti, E., Made, N., & Erawati, A. (2016). PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA , SISTEM PENGENDALIAN INTERN , PEMAHAMAN BASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud , 16, 1290–1318.
- Creswell, J. W. (2009). *Researrch Design Qualitative, Qunatitative, and Mixed Methos Approaches* (Trird Edit). SAGEPublications. Inc. 2455.
- Febrian Cahyo Pradono Basukianto. (2015). KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, September 2015, Hal. 188 – 200 ISSN: 1412-3126, 22(2), 188–200.
- KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (2001).
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (2008).
- Peraturan pemerintah RI Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010).
- Sugiyono. Metode Penelitian (2012). Bandung.
- sukmaningrum Tantriani. (2015). *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 1(3).
- SYARIF SYAHRIR MALLE. (2013). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Skripsi*. Makassar.